



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
KECAMATAN TENGAHTANI
TAHUN 2021**

**Jalan Pahlawan No.67 Desa Dawuan
KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAHTANI
Jalan Pahlawan Nomor 67 Dawuan Tengahtani - Kode Pos 45174
CIREBON

KEPUTUSAN CAMAT TENGAHTANI

NOMOR : 050 / Kep./ 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
TAHUN 2021
CAMAT TENGAHTANI

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negri Sipil Kecamatan Tengahtani perlu adanya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu dibuat Keputusan Camat Tengahtani .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Tengahtani

Pada tanggal : September 2021



Pembina TK I

NIP. 19660601 199803 1 003

Tembusan :

Yth. Bupati Cirebon;

Yth. inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENGAHTANI

NOMOR : 050 / - Kec

TANGGAL : SEPTEMBER 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KECAMATAN TENGAHTANI TAHUN 2021

Ketua	:		Nama	:	YUYU, SP.
			NIP	:	19690104 199703 1 002
			Jabatan	:	Sekretaris Kecamatan Tengahtani
Koordinator	:		Nama	:	AKHMAD FAUZI, S.I.P.
			NIP	:	19760526 200801 1 004
			Jabatan	:	Kepala Subbagian Program dan Keuangan
Anggota	:	1.	Nama	:	USMAN, SH.
			NIP	:	19650807 198603 1 020
			Jabatan	:	Kepala Seksi Pemerintahan
		2.	Nama	:	SULASTRI, A.Md.
			NIP	:	19631231 198302 2 009
			Jabatan	:	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
		3.	Nama	:	SUGANDI, SAP.
			NIP	:	19651211 199103 1 009
			Jabatan	:	Keamanan , Ketertiban, Perlindungan masyarakat dan Pembinaan kesatuan bangsa
		4.	Nama	:	HERMI
			NIP	:	19640909 199403 2 010
			Jabatan	:	Kepala Seksi Pelayanan Publik
		5.	Nama	:	CUCU SUMIATI, S.IP.
			NIP	:	19770723 200501 2 010
			Jabatan	:	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



Pembina TK I

NIP. 19660601 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Perubahan Tengahtani Kabupaten Cirebon tahun 2021 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani tahun 2021 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Tengahtani yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah,

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2021 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Tengahtani, September 2021



NIP. 19660601 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftarisi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud Dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2020	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2020	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tengahtani	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tengahtani	12
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021	15
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani	15
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2021	16
Bab IV Penutup	25

BAB I

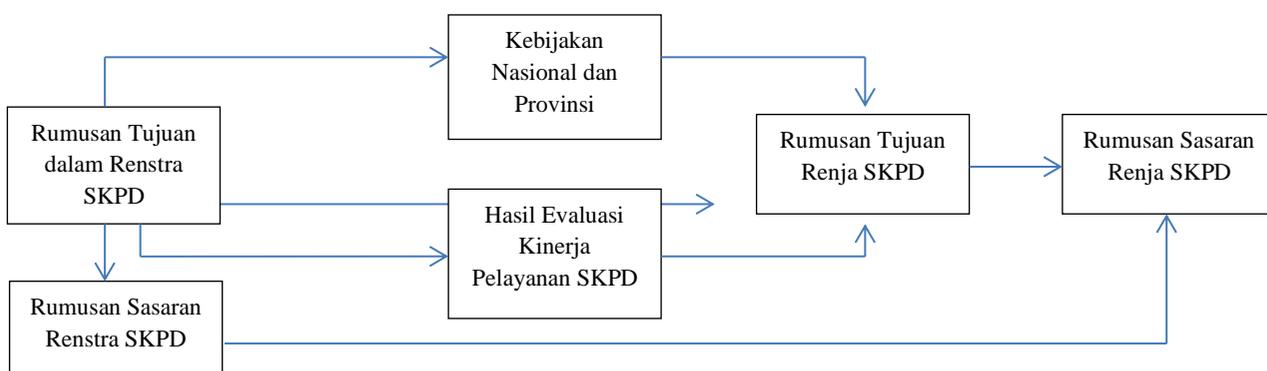
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program serta Kegiatan dari Renstra Kecamatan Tengahtani, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Tengahtani adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabputen Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Tengahtani untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Tengahtani.

- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 adalah :
1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tengahtani

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani
- 3.2. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TENGAHTANI TAHUN 2020

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAHTANI
TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tengahtani Tahun 2020 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2020, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani,

Pada tahun 2020 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.746.834.300,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.382.958.788,00 atau 86,75 %. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tengahtani Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 44.816.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 42.140.306,00 sisa sebesar Rp. 2.675.994,00 atau tercapai sebesar 94,03%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.156.006,00 sisa sebesar Rp 2.243.994,00 atau tercapai sebesar 89,00 %.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran rekening listrik dan tidak adanya pemutusan atau tunggakan pembayaran rekening tersebut.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran

- b. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.118.000,00 sisa sebesar Rp. 432.000,00 atau tercapai sebesar 83,05%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan Perizinan Kenjdaraan Dinas, dalam rangka terisi pajak kendaraan 6 bermotor selama 1 (satu) tahun, STNK yang terbayar dan tidak terlambatnya pajak kendaraan.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas dan pajak STNK.

- c. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.300.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan kerja dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran perbaikan peralatan kerja dan tidak adanya peralatan yang rusak. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

- d. Kegiatan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.510.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

- e. Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.311.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.311.300,00 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran 7 barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.140.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp.3.140.000,00.- sisa sebesar Rp.0,00.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran lampu pijar baterai kering dan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

- g. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000,- sisa sebesar Rp.0,00,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Almari, sebagai perlengkapan kantor.

Outcome kegiatan adalah Bertambahnya Jumlah Aset/Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran.

- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.215.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.000,00.- sisa sebesar Rp.0.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai 8 Kecamatan Tengahtani selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya informasi pegawai Kecamatan Tengahtani dalam rangka meningkatkan pengetahuan umum

- i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.390.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp.3.390.000,00.- sisa sebesar Rp.0,00.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman serta snack, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran makanan dan minuman dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kebutuhan makanan dan minuman Kecamatan Tengahtani dalam rangka rapat koordinasi.

- j. Kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp. 900.000,00.- sisa sebesar Rp.0,00.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas.

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Perjalanan Dinas Kecamatan Tengahtani dalam rangka Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan perkantoran

(2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.552.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.552.00,00 sisa sebesar Rp.414.000,00 dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur dengan target 100% dan tercapai sebesar 99,60%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.382.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp.71.968.000,00.- sisa sebesar Rp.414.000,00.- atau tercapai sebesar 99,42%.

Output kegiatan adalah tersedianya Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap, Premi Asuransi Kesehatan, sewa gedung kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, nota pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap, Premi Asuransi Kesehatan, sewa gedung kantor, sewa gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan lancarnya dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.264.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp.33.624.000,00.- sisa sebesar Rp.0,00.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 9 unit motor dan 1 mobil, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan perkantoran , nota pembayaran struk pertamax.

Outcome kegiatan adalah lancarnya dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Tengahtani dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.000,00.- dan terealisasi sebesar Rp.320.000,00.- sisa sebesar Rp.0,00.- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan perkantoran , nota pembayaran struk.

Outcome kegiatan adalah lancarnya dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Tengahtani dalam rangka terpeliharanya peralatan gedung kantor.

(3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.570.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan dengan target 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.570.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.4.570.000.00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dalam rangka laporan capaian realisasi kinerja SKPD dan tersusunya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Outcome kegiatan adalah tersusunya Dokumen LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, LKPJ dan LPPD Kecamatan Tengahtani dalam rangka ketersediaan Dokumen.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan adanya pemokusan anggaran terkait anggaran penanganan Covid-19.

Output kegiatan adalah tersusunya laporan keuangan semesteran, dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan, tersusunya dokumen laporan keuangan semesteran.

Outcome kegiatan adalah tersusunya Dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan Tengahtani dalam rangka ketersediaan 1 Dokumen.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.00,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100,00%. Dengan adanya pemokusan anggaran terkait anggaran penanganan Covid-19.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun pada peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Catatan Kinerja dan Keuangan sebanyak 1 Dokumen.

Outcome kegiatan adalah tersusunya Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun Kecamatan Tengahtani dalam rangka ketersediaan Dokumen.

(4). Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Pelaksanaan program dan kegiatan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral dengan target 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Pengembangan Sisten Perencanaan Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersusunya dokumen perencanaan sektoral

Outcome kegiatan adalah tersusunya Renja dan Renstra Kecamatan Tengahtani.

1. Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Kecamatan Tengahtani menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:
 - (1) Sumberdaya Aparatur di Kecamatan Tengahtani yang memiliki kapasitas dalam perencanaan masih terbatas sehingga proses penyusunan perencanaan di kecamatan masih mengalami kendala;
 - (2) Sarana dan Prasarana untuk mendukung proses penyusunan perencanaan masih belum memadai;
 - (3) Masih kurangnya anggaran yang di berikan kepada Kecamatan Tengahtani.
 - (4) Surat menyurat sering terjadi keterlambatan tanda tangan/disposisi dikarenakan pimpinan sedang dinas di Perangkat Daerah lainnya (Rapat) sehingga membutuhkan waktu tunggu.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Tengahtani telah melakukan solusisolusi sebagai berikut:

- (1) Menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam bidang perencanaan.
- (2) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung proses penyusunan perencanaan;
- (3) Memaksimalkan anggaran yang ada untuk menyelesaikan penyusunan perencanaan.
- (4) Pentingnya Aplikasi/sistem e-Surat untuk mempercepat layanan kepada masyarakat maupun stake holder lainnya.

5). Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

Program Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada camat, dengan anggaran sebesar Rp.90.688.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.90.412.000,00 sisa sebesar Rp.276.000,00 dengan indikator kinerja yaitu Terlaksananya Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Camat dengan target 100% dan tercapai sebesar 99,69%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada camat bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.940.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 12 Kali

Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.800.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Sosial sebanyak 12 Kali

Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Sosial

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.944.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.806.000,00 sisa sebesar Rp.138.000,00 atau tercapai sebesar 99,44%.

Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa sebanyak 12 Kali.

Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan bidang Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa di Wilayah Kecamatan Tengahtani.

4. kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.376.000,00 sisa sebesar Rp.138.000,00 atau tercapai sebesar 99.41%.

Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Umum sebanyak 12 Kali.

Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Umum di Wilayah Kecamatan Tengahtani.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.490.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.11.490.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa sebanyak 12 Kali.

Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Tengahtani.

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TENGAHTANI

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Tengahtani dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Tengahtani dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tengahtani dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Tengahtani berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Tengahtani. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tengahtani. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Tengahtani.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Tengahtani yaitu antara lain :

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon

No	Rencana Struktur	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1	2	3	4	5	6
1.	Ruas-Ruas Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	Pengembangan jalan lingkungan berhotmix dan bebas banjir	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan lingkungan yang belum termasuk dalam ruas jalan kabupaten	Wilayah Kecamatan Tengahtani
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (Non Hutan)	Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase	
3.	Kawasan Kearifan Lokal	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Non Hutan)		Ada, Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	
4.	Sistem Perkotaan	Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Perdesaan - Pengembangan fasilitas umum - Pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya 	Ada, fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah	

5.	Pusat Lingkungan	kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan dan pengawasan kebersihan lingkungan	
6.	Kawasan rawan Bencana	Pemukiman		Ada, koordinasi penanggulangan bencana alam	Wilayah Kecamatan Tengahtani
7.	Kawasan Perumahan	Perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman yang belum memiliki listrik	
9.	Kawasan industri	Home Industri	Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki strategis ekonomi	Ada, Fasilitasi Pembentukan Kawasan Wirausaha Sentra Batik	Kecamatan Tengahtani

Dari tabel tersebut di atas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Tengahtani. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri menengah di Kecamatan Tengahtani yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Tengahtani.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Tengahtani, yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan dii seluruh Desa di Kecamatan Tengahtani

2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Tengahtani berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Tengahtani 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian hukuman ataupun

	Ketertiban Aparatur				Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa 	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Tengahtani berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas.
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari

penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Tengahtani ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani dapat dilihat pada lampiran

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Tengahtani Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Depok pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan , Serta Pelimpahan sebagian Kewenagna dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Tengahtani dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel Berikut:



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.33. KECAMATAN TENGAH TANI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					2.707.820.660	2.663.098.776	(44.721.884)		
7.01.	KECAMATAN					2.707.820.660	2.663.098.776	(44.721.884)		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima		100 Prosen	100 Prosen	84.337.928	79.899.276	(4.438.652)		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100 Prosen	100 Prosen	100.771.100	114.142.500	13.371.400		
		Meningkatnya disiplin aparatur		100 Prosen	100 Prosen	2.281.457.932	2.185.507.000	(95.950.932)		
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Prosen	100 Prosen	4.590.000	4.590.000	-		
		Peningkatan sistem Perencanaan Sektor yang Akuntabel		100 Prosen	100 Prosen	3.150.000	3.150.000	-		
		Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah			100 Prosen	-	-	-		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	6.300.000	6.300.000	-		
7.01.01.01.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	0 Dokumen	3.150.000	3.150.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kabupaten Cirebon		2 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.01.2.01 .06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	3.150.000	3.150.000	-	PIS	PIS
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	Kabupaten Cirebon		0 Laporan	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	2.186.947.000	2.186.947.000	-		
7.01.01.01.2.02 .01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kabupaten Cirebon	16 Pegawai	16 Pegawai	2.281.457.932	2.185.507.000	(95.950.932)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02 .05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	855.000	855.000	-	PIS	PIS
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	Kabupaten Cirebon		0 Laporan	-	-	-		
7.01.01.01.2.02 .07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	585.000	585.000	-	PIS	PIS
		Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang dihasilkan	Kabupaten Cirebon		0 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	-	-	-		
7.01.01.01.2.05 .02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang dibeli	Kabupaten Cirebon	24 Stel	0 Stel	-	-	-		
		Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	Kabupaten Cirebon		0 Stel	-	-	-		
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	56.558.300	56.558.300	-		
7.01.01.01.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kabupaten Cirebon	5 Jenis	5 Jenis	4.328.000	4.328.000	-	PIS	PIS
		Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Cirebon		3 Jenis	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.01.01.2.06 .02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Cirebon	6 Jenis	4 Jenis	21.980.200	21.980.200	-	PIS	PIS
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kabupaten Cirebon		0 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat dan Jamuan Tamu	KABUPATEN CIREBON	11 Kali	7 Kali	8.060.000	8.060.000	-	PIS	PIS
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	KABUPATEN CIREBON		4 Kali	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Cirebon	6 Jenis	6 Jenis	5.110.000	4.816.100	(293.900)	PIS	PIS
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Cirebon		6 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	360 Eksemplar	270 Eksemplar	2.790.000	2.790.000	-	PIS	PIS
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kabupaten Cirebon		2 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Kabupaten Cirebon	25 Jenis	25 Jenis	12.784.000	12.784.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Kabupaten Cirebon		25 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Kabupaten Cirebon	11 Kali	0 Kali	-	-	-		
7.01.01.01.2.06 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Cirebon	24 Laporan	15 Laporan	1.800.000	1.800.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	Kabupaten Cirebon		9 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	20.690.976	20.690.976	-		
7.01.01.01.2.08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	Kabupaten Cirebon	1 Jenis	1 Jenis	22.195.728	18.050.976	(4.144.752)	PIS	PIS
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Kabupaten Cirebon		1 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.08 .03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	KABUPATEN CIREBON	5 Unit	3 Unit	2.640.000	2.640.000	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	KABUPATEN CIREBON		2 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	116.792.500	116.792.500	-		
7.01.01.01.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KABUPATEN CIREBON	10 Unit	10 Unit	33.230.000	44.325.000	11.095.000	PIS	PIS
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.	KABUPATEN CIREBON		10 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.09 .02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	Kabupaten Cirebon	11 Unit	9 Unit	2.650.000	2.650.000	-	PIS	PIS
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya.	Kabupaten Cirebon		2 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten Cirebon	2 Jenis	0 Jenis	-	-	-		
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.	Kabupaten Cirebon		0 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.09 .09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	67.541.100	69.817.500	2.276.400	PIS	PIS
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	Kabupaten Cirebon		1 Unit	-	-	-		
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik		100 Prosen	0 Prosen	-	-	-		
		Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	100 Prosen	142.301.700	99.873.000	(42.428.700)		

		Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100 Prosen	-	-	-		
--	--	--	--	--	------------	---	---	---	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 BA	1 BA	15.000.000	15.000.000	-		
7.01.02.02.2.01 .02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	8 Laporan	22.200.000	15.000.000	(7.200.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Kabupaten Cirebon		4 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 BA	1 BA	34.773.000	34.773.000	-		
7.01.02.02.2.02 .03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	6 Laporan	38.337.000	34.773.000	(3.564.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kabupaten Cirebon		6 Laporan	-	-	-		

7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 BA	1 BA	50.100.000	50.100.000	-		
7.01.02.02.2.04 .02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang dilaksanakan		2 Laporan	0 Laporan	-	-	-		
7.01.02.02.2.04 .03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	8 Laporan	81.764.700	50.100.000	(31.664.700)	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	Kabupaten Cirebon		4 Laporan	-	-	-		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	100 Prosen	50.475.000	49.035.000	(1.440.000)		
		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan			100 Prosen	-	-	-		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 BA	1 BA	49.035.000	49.035.000	-		
7.01.03.03.2.01 .03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	9 Laporan	50.475.000	49.035.000	(1.440.000)	PIS	PIS
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Kabupaten Cirebon		3 Laporan	-	-	-		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	100 Prosen	40.737.000	40.773.000	36.000		

		Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 Prosen	-	35.000.000	35.000.000		
7.01.04.04.2.01 .01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	35.000.000	35.000.000	PIS	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 BA	1 BA	40.773.000	40.773.000	-		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.04.04.2.02 .01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	5 Laporan	40.737.000	40.773.000	36.000	PIS	PIS
		Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.	Kabupaten Cirebon		7 Laporan	-	-	-		
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah (Bupati) kepada camat			100 Prosen	-	50.000.000	50.000.000		
7.01.05.05.2.01 .02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kabupaten Cirebon (- Kecamatan tengah tani)		4 laporan	-	50.000.000	50.000.000	PIS	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	-	1.129.000	1.129.000		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		1 BA	1 BA	1.129.000	1.129.000	-		

		Pemerintahan Desa								
7.01.06.06.2.01 .06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)	Kabupaten Cirebon		1 Desa	-	1.129.000	1.129.000	PIS	
7.01.06.06.2.01 .16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Cirebon	8 Laporan	0 Laporan	-	-	-		
J U M L A H						2.707.820.660	2.663.098.776	(44.721.884)		

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tengahtani di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Tengahtani sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2021. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tengahtani demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tahun anggaran 2021, Kecamatan Tengahtani telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Tengahtani, September 2021



CAMAT TENGAHTANI
KECAMATAN
TENGAHTANI
H. SUNARNO, S.T., M.Si
Pembina TK I
NIP. 1960601 199803 1 003

